

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov DKI Siap Hadapi Banjir

JAKARTA—Banjir bandang membuat Pemprov DKI mengejar target pembebasan lahan normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung. Pembebasan lahan ditargetkan rampung pada Maret ini. Normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini Yusuf mengatakan, pembebasan lahan untuk sodetan Kali Ciliwung dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane (BBWSCC).

"Kalau Sodetan Ciliwung itu tugasnya Kementerian. Kita fasilitasi saja. Nah saat ini, pembebasan lahan di Sodetan Kali Ciliwung dan normalisasi Kali Ciliwung sedang kita inventaris nih. Kalau surat-surat mereka sudah lengkap, ya langsung bayar. Kita targetkan pembebasan lahan untuk kedua proyek ini dapat rampung Maret atau April," ujar Juaini di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dia mengatakan, pembebasan lahan Sodetan Kali Ciliwung dikerjakan oleh BBWSCC. Dinas SDA DKI lebih fokus untuk membebaskan 118 bidang lahan di tepi Kali Ciliwung untuk pengerjaan normalisasi. Ratusan bidang lahan tersebut, tersebar di Kelurahan Tanjung Barat dan Pejaten Timur di Jakarta Selatan dan Kelurahan Batu Ampar dan Cililitan di Jakarta Timur.

"Kita fokus ke pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Kan

ada di empat kelurahan di dua wilayah DKI. Kalau urusan sodetan itu urusan Kementerian," ujar Juaini Yusuf. Anggaran untuk pembebasan 118 bidang lahan dialokasikan sebanyak Rp160 miliar dari total anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi dan naturalisasi sungai dan waduk sebesar Rp669 miliar.

Saat ini, pihaknya menginventarisasi lahan warga. Setelah rampung, pihaknya akan memastikan kembali dokumen kepemilikan atau sertifikat tanah warga pemilik lahan tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan aturan hukum. Tidak hanya itu, juga dipastikan kewajiban pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) sudah ditunaikan oleh pemilik lahan.

"Nanti setelah normalisasi Kali Ciliwung ini rampung, maka kita akan lanjutkan dengan pembebasan lahan di Kali Pesanggrahan dan lainnya. Ini kita lakukan untuk pengendalian banjir. Tetapi prioritas pengendalian banjir di tahun 2020 ini, kita selesaikan normalisasi Kali Ciliwung," jelas Juaini.

Menurut dia, aturan penetapan lokasi (penlok) untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung telah keluar. Hanya saja kendalanya, surat-surat dokumen kepemilikan serta kewajiban warga pemilik lahan belum semuanya terinventarisasi. "Kita sudah ada tim persiapan pembebasan lahan, perlok sudah keluar. Kendalanya kan surat-surat warga," tandas Juaini.

Untuk mengendalikan banjir di Jakarta, Pemprov DKI menyiapkan strategi

penanganan, pengendalian dan pencegahan banjir di Jakarta dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Bila strategi jangka panjang memakan waktu tahunan dengan membangun waduk, situ, embung dan terus membangun tanggul di pinggir laut serta melanjutkan normalisasi dan naturalisasi. Maka untuk strategi jangka pendek untuk pencegahan dan pengendalian banjir, Dinas SDA tetap mengandalkan pompa air untuk mengalirkan air banjir ke laut atau sungai.

Masih menurut Juaini, untuk strategi jangka pendek, Pemprov DKI tetap mengandalkan pompa air stasioner dan mobile untuk memecah debit air dengan mengalirkannya ke laut atau sungai. Seluruh pompa air yang dimiliki Pemprov DKI, yakni sebanyak 400 pompa stasioner dan 133 pompa mobile yang tersebar di 140 lokasi akan disiagakan selama 24 jam.

Diharapkan semuanya dapat berfungsi dengan maksimal selama musim penghujan yang akan berlangsung hingga dua bulan mendatang. "Pompa-pompa mobile ini yang kita kerahkan di semua titik banjir yang berada di lima wilayah. Untuk membantu percepatan penurunan genangan air," kata Juaini.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan pengecekan pompa-pompa stasioner (permanen) yang berada di rumah pompa dapat berfungsi dengan baik. Juga pompa-pompa mobile akan terus diperhatikan pemeliharannya,

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov DKI Siap Hadapi Banjir

agar dapat beroperasi dengan baik.

Untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi rumah pompa yang terendam banjir, Juaini Yusuf mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dengan meninggikan rumah-rumah pompa atau pompa air yang ada di rumah pompa tersebut. Dinas SDA memetakan lokasi rumah pompa yang dinilai rawan banjir. "Melihat situasi ini, dan tidak terjadi lagi, kita harus mengevaluasi dengan meninggikan pompa yang ada. Di lokasi yang selama ini kita anggap rawan," ujar Juaini.

Karena sangat mengandalkan pompa-pompa air di rumah pompa, maka Dinas SDA DKI pun telah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan rumah pompa dalam APBD DKI 2020 sebesar Rp106,44 miliar dari total anggaran untuk pengendalian banjir sebesar Rp1,48 triliun.

Dengan rincian, pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya sistem aliran tengah sebesar Rp49,98 miliar. Lalu, pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya sistem aliran timur sebesar Rp32,18 miliar.

Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya sistem aliran barat senilai Rp 24,28 miliar. Strategi jangka pendek lainnya, lanjut Juaini Yusuf, adalah terus meningkatkan koordinasi dengan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI dan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG).

Setiap informasi mengenai kondisi cuaca dan ketinggian air di pintu-pintu air akan diteruskan kepada warga yang berada di lokasi terdampak banjir. Sehingga mereka bisa bersiap-siap untuk evakuasi.

"Kalau SOPnya itu, ketika ketinggian muka air di pintu air Katulampa sudah siaga 4, maka kita sudah harus melakukan persiapan. Seperti, sudah melakukan penyedotan di rumah-rumah pompa. Petugas sudah ada di lokasi masing-masing. Jadi jika sudah siaga 4, kita update terus mengirim data-data itu hingga siaga 1," papar Juaini.

Dia mengakui, strategi jangka pendek tersebut tidak akan menjamin Kota Jakarta tidak mengalami banjir besar. Karena itu, pelaksanaan strategi jangka pendek harus diiringi dengan strategi jangka panjang, yakni banyak membangun waduk, situ dan embung serta melanjutkan normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta.

Sepanjang 2020, lanjut Juaini, Pemprov DKI akan fokus pada pembangunan Waduk Brigif (Aliran Kali Krukut), Waduk Pondok Ranggon (Aliran Kali Sunter), Waduk Cimanggis (Aliran Kali Cipinang). "Tahun 2020 ini kita akan melanjutkan pembangunan waduk. Seperti Waduk Marunda akan diteruskan, Waduk Brigif dan Waduk Cimanggis. Tiga waduk ini akan diba-

ngun tahun ini untuk memperbanyak tampungan air," terang dia.

Selain itu, proyek antisipasi banjir lainnya yang akan berjalan selain pembangunan waduk, yakni pembangunan Sodetan Kampung Walang Ancol (Aliran Kali Ciliwung Lama Manggarai), serta Tanggul Pengaman Pantai Kali Kamal.

Untuk itu, Dinas SDA DKI telah mengalokasikan anggaran pembangunan pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, waduk, situ, embung dan kelengkapannya. Di antaranya, pembangunan pengendalian banjir melalui naturalisasi kali/sungai, waduk/situ/embung dan kelengkapannya sebesar Rp288,6 miliar.

Untuk anggaran ini, dialokasikan untuk membangun Waduk Kampung Rambutan, Waduk Pondok Ranggon, Waduk Cimanggis dan Waduk Sunter. "Ini untuk pembangunan waduk baru dengan konsep kembali ke natural. Ya kita tanam pohon-pohon, ada taman, ada interaksi warga juga. Jadi fungsinya sebagai pengendalian banjir dan juga dipakai untuk interaksi warga," terang Juaini.

Untuk pembangunan waduk baru pengendalian banjir, Juaini menekankan tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat. "Yang waduk enggak, kita sendiri, mulai dari bebasin lahan hingga pembangunan fisiknya ya kita lakukan sendiri," ungkap dia. Kemudian pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya akan dilakukan di tiga sistem aliran air Jakarta. (dni)